

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kebijakan REPowerEU lahir sebagai respons UE terhadap krisis energi yang diperburuk oleh konflik Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022. Konflik ini mengancam keamanan energi UE, yang sebelumnya sudah terguncang akibat lonjakan harga energi global pasca-pandemi. Kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor domestik dan internasional yang memengaruhi arah pengambilan keputusan.

Dari perspektif domestik, Komisi Uni Eropa (UE) memainkan peran sentral sebagai penggerak birokrasi dengan memanfaatkan hak inisiatifnya untuk merancang langkah-langkah strategis. Dukungan masyarakat terhadap langkah-langkah ini tercermin dalam survei yang dilakukan oleh European Council on Foreign Relations (ECFR), yang menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap konflik serta kepercayaan pada kemampuan UE. Media, termasuk *Politico* dan *Eureporter*, turut memberikan kontribusi penting melalui analisis yang mendukung kebijakan UE, tanpa adanya kritik signifikan. Selain itu, kelompok kepentingan seperti Union of the Baltic Cities (UBC) dan Age Platform Europe memperlihatkan solidaritas mereka terhadap Ukraina. Di sisi lain, beberapa partai politik UE mendukung Ukraina sekaligus mengutuk tindakan Rusia, sementara Partai Hijau memberikan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada mitigasi dampak krisis energi.

Pada tingkat internasional, konflik ini berdampak pada dinamika politik global, yang ditandai dengan respons dari berbagai aktor seperti

NATO, G7, dan Kanada. Di tingkat regional, tantangan juga muncul dari hambatan perizinan di negara-negara anggota UE, yang memperlambat percepatan implementasi energi terbarukan. Hubungan bilateral antara UE dan Ukraina terus menguat melalui perjanjian asosiasi, yang bertujuan memperdalam kerja sama politik dan ekonomi antara kedua pihak. Selain itu, aktor non-negara seperti Greenpeace turut memberikan pengaruh signifikan dengan mendorong percepatan transisi energi sebagai solusi untuk mengatasi krisis yang sedang berlangsung.

Kebijakan REPowerEU membawa perubahan signifikan dalam strategi energi Uni Eropa. Diversifikasi sumber energi menjadi prioritas utama, dengan tujuan mengakhiri ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia sepenuhnya pada tahun 2027. Uni Eropa juga menggalakkan penghematan energi melalui kampanye yang mendorong masyarakat untuk secara sukarela mengurangi konsumsi. Selain itu, transisi menuju energi terbarukan dipercepat dengan fokus pada pengembangan tenaga surya, angin, dan hidrogen, didukung oleh mekanisme pendanaan kolektif. Regulasi terkait penyimpanan energi juga diperketat untuk menjamin ketersediaan selama periode musim dingin.

Meskipun demikian, kebijakan ini menghadapi tantangan, seperti ketergantungan yang masih tinggi pada impor LNG dari Rusia. Namun, REPowerEU mencerminkan komitmen Uni Eropa untuk memperkuat keamanan energi sekaligus mempercepat transisi menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.

## 4.2 Saran

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh perubahan kebijakan yang dilakukan oleh UE dalam mengatasi krisis energi yang sedang terjadi dengan mengeluarkan kebijakan REPowerEU. Pengambilan waktu yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, pada tahun 2022 hingga 2024. Dengan demikian, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu agar membahas tentang keberlanjutan dari kebijakan REPowerEU, mengingat kebijakan ini memiliki target yang berjangka panjang untuk mencapai kemandirian energi di masa depan tetapi masih terdapat hambatan yang berupa ketergantungan LNG. Maka hal ini memunculkan pertanyaan “seberapa besar kemungkinan REPowerEU membawa UE untuk mencapai kemandirian energi ?”